

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Beragam upaya dilakukan negara di dunia untuk bisa meningkatkan kondisi perekonomiannya sehingga dapat mensejahterakan seluruh rakyatnya. Kaum sosialis menganggap dominasi pemerintah dalam perekonomian dan meminimalisasi hak kepemilikan harta masyarakat adalah cara yang paling tepat untuk mengoptimalkan perekonomian dan kesejahteraan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Whittaker bahwa sistem ekonomi sosialis menunjukkan sistem-sistem kepemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber produksi (selain labor) secara kolektif. Sosialis bisa mencakup asosiasi kooperatif maupun kepemilikan dan pengoperasian oleh pemerintah. (Deliarnov, 2012)

Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan ketebatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan pendapatan daerah semakin melebur.

Sementara Adam Smith, pencetus sistem ekonomi liberalis memiliki pendapat yang berlawanan dengan sistem ekonomi sosialis. Menurut Smith, Negara sama sekali tidak boleh mengatur perekonomian, melainkan menyerahkan segala sesuatunya pada invisible hand. Dalam sistem ekonomi liberalis, tiap individu diberikan keleluasan yang besar dalam perekonomian. Paham liberalis tersebut di dasarkan pada pemikiran Smith, bahwa walaupun setiap orang didorong untuk mengejar kepentingannya masing-masing, namun adanya persaingan bebas

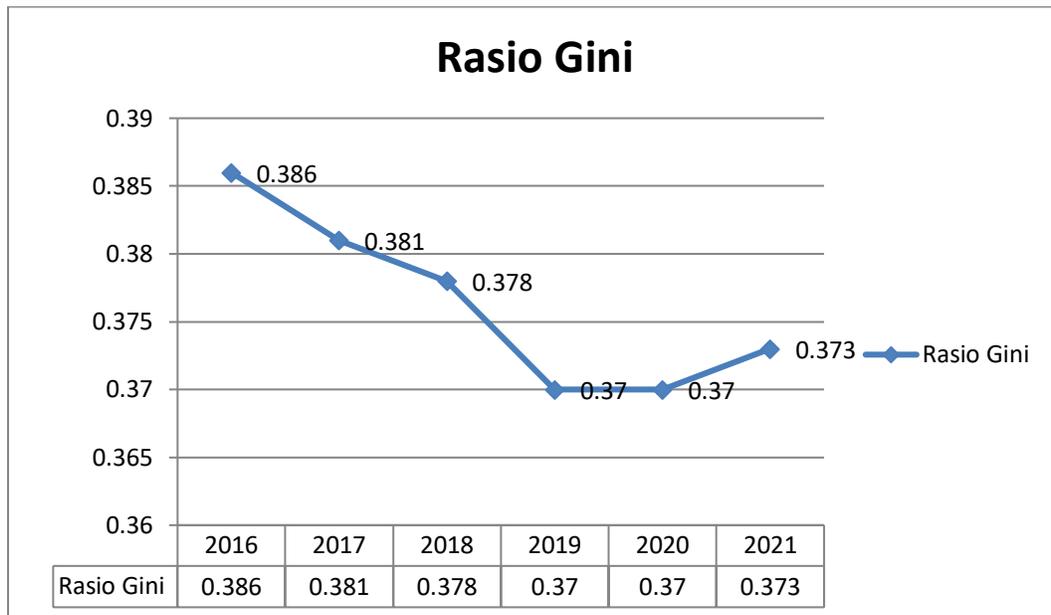
menjamin masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit sehingga akan tercapailah kesejahteraan umum (General welfare). (Deliarnov, 2012)

Distribusi pendapatan yang adil, jika semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil produksi nasional, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh salah satu faktor penting yaitu ketimpangan pendapatan yang rendah, namun faktor ini sering tidak diperhitungkan dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu. Pada umumnya yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita (Arsyad, 2017).

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang terjadi dalam kelompok masyarakat yang mana terdapat kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Adanya perbedaan pendapatan tersebut merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh sebuah negara, yang mana masalah tersebut merupakan tidak meratanya pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat di suatu negara tersebut. Variasi dalam ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari besarnya perbedaan pendapatan yang terjadi.

Berikut adalah Data Ketimpangan Pendapatan yang di Ukur dengan Gini Rasio di Indonesia sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2016-2021**



*Sumber : Badan Pusat Statistik (Statistik Indonesia 2021)*

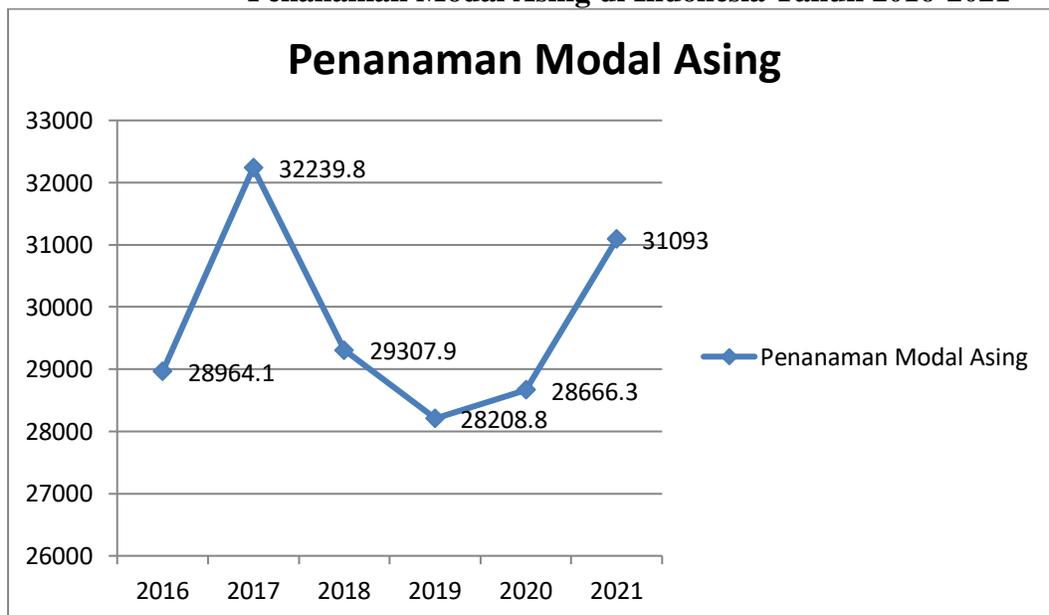
Berdasarkan Tabel 1.1 Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. (BPS,2020)

Tabel diatas menunjukkan Gini rasio tercatat sebesar 0.386 pada tahun 2016, lalu turun menjadi 0.381 pada tahun 2017, turun kembali menjadi 0.378 pada tahun 2018. Kemudian, gini rasio pada tahun 2019 sebesar 0.37 dan naik lagi menjadi 0.373 pada tahun 2021.

Semakin tinggi kesenjangan pendapatan akan memperbesar terjadinya masalah sosial. Ketidak seimbangan sosial akan menyebabkan ketidak stabilan ekonomi. Tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi akan terkait langsung dengan ketidak stabilan ekonomi, krisis finansial, beban utang dan inflasi.

Solusi lain untuk mengurangi ketimpangan pendapatan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong perkembangan investasi di Indonesia. Salah satunya melalui masuknya investasi asing langsung. Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia tertinggal jauh dari negara lain dalam hal penanaman modal asing langsung (FDI). Masuknya FDI sangat penting untuk integrasi ekonomi internasional karena menciptakan hubungan yang stabil antara lingkungan ekonomi negara. Dalam penelitiannya, Babatunde (2018) menemukan bahwa masuknya investasi asing langsung dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini berbeda dengan temuan Porfaraj dan Megheran (2019) yang menemukan bahwa FDI tidak mempengaruhi ketimpangan. Berikut adalah Data Penanaman Modal Asing yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2016-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik (Statistik Indonesia 2021)

Pada tabel 1.2 Bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Perusahaan asing ini berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh setidaknya dua pemegang saham, baik itu perorangan atau perusahaan. Selanjutnya,

seperti yang sudah disebutkan di atas, investor harus memperhatikan panduan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk asing yang tercantum dalam Perpres No. 44 Tahun 2016. Apabila bidang usahanya tidak tercantum dalam daftar tersebut, berarti kepemilikan saham asing bisa sampai 100%. Nilai minimum investasi asing di Indonesia adalah Rp 10 miliar (tidak termasuk harga tanah dan bangunan). Jumlah minimal modal yang disetor ke bank di Indonesia adalah Rp 2,5 miliar.

Pada tabel diatas terlihat perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tahun 2016-2021 mengalami naik turun mulai dari tahun 2016 sebesar 28964.1 Juta US\$ meningkat sampai tahun 2017 sebesar 32239.8 Juta US\$ dan mengalami penurunan sampai tahun 2021 sebesar 31093.1 Juta US\$. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin tinggi penanaman modal asing di indonesia maka semakin tinggi pendapatan negara melalui pajak, Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara. Dan sebaliknya jika penanaman modal asing rendah akan meningkatnya pengangguran karena lapangan pekerjaan yang sedikit, saat pengangguran meningkat jumlah kemiskinan juga akan meningkat, kemudian ketimpangan pendapatan akan meningkat.

Salah satu ukuran peningkatan pencapaian proses pembangunan, stabilitas atau membaiknya ketimpangan pendapatan dalam sebuah negara adalah dengan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang stabil dipengaruhi oleh stabilitas politik. Tetapi jika ketidak stabilan politik terjadi di suatu negara akan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang tinggi dan penurunan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Ketidak stabilan politik salah satunya dapat terjadi dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau penyalahgunaan jabatan politik. Pelanggaran atau

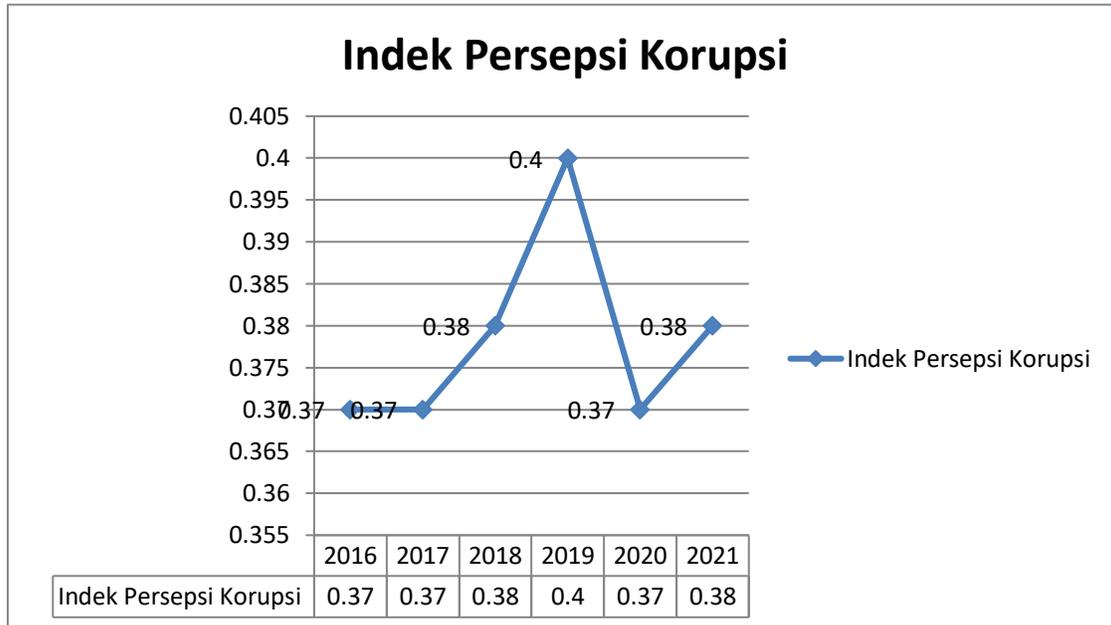
penyalahgunaan politik yang paling sering terjadi dan kemudian menjadi fenomena umum di banyak negara adalah korupsi. Korupsi memang selalu menjadi isu hangat dalam penyelenggaraan pemerintah. Secara mendunia, korupsi sudah disepakati sebagai tindak pidana yang menjadi musuh dan penyakit bagi seluruh bangsa di seluruh negara di dunia. Korupsi tidak mengenal negara maju maupun negara miskin, karena korupsi sudah tumbuh dan mengakar bahkan menjadi budaya hampir di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin (Andiani, 2018).

Korupsi dipandang sebagai kegagalan mekanisme pasar, ditandai dengan adanya peluang bagi pelaku pasar untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya dengan cara melanggar hukum dan memanfaatkan celah yang ada pada peraturan. Korupsi sebagai salah satu faktor terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Studi menggunakan koefisien gini yang dilakukan oleh Gupta, Devodi dan Alonso sebagai metode pengukuran terlihat bahwa dari indeks tersebut diketahui bahwa korupsi mengakibatkan semakin lebarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini ditunjukkan dari semakin besarnya angka koefisien gini seiring dengan kejadian korupsi. (Policardo et al., 2019).

Berikut adalah Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Tahun 2016-2021**

*Sumber : Badan Pusat Statistik (Statistik Indonesia 2021)*



Pada table 1.3 Indeks persepsi korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah) oleh karena itu semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. (Gupta, DKK.2002)

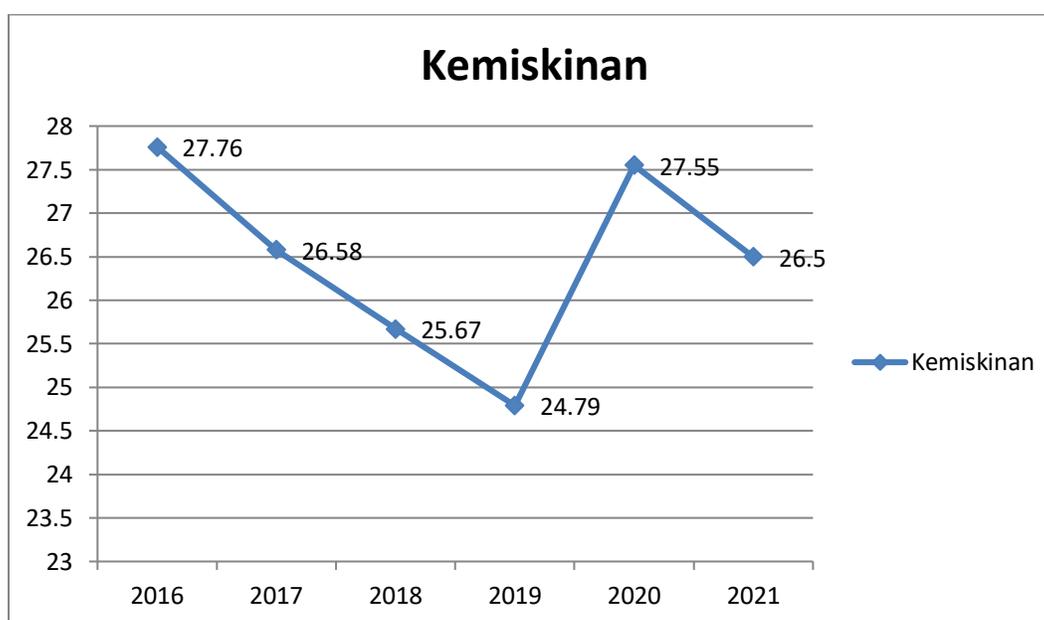
Terlihat perkembangan indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2016 - 2021 rata-rata mengalami naik turun tetapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 angka IPK tinggi sebesar 0.38 yang artinya tingkat IPK pada tahun ini termasuk ke skala rendah dan pada tahun 2021 angka IPK rendah sebesar 0.38 yang artinya tingkat IPK pada tahun ini termasuk ke skala tinggi. Tinggi nya tingkat skala korupsi maka akan mengakibatkan menurunnya tingkat investasi, menciptakan sistem kelembagaan yang buruk, meningkatkan kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. (Rimawan, 2016)

Masalah ketimpangan akan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia karena mereka yang kaya akan cenderung semakin kaya dan mereka yang miskin akan cenderung semakin miskin.

Adanya perbedaan pendapatan yang ekstrim ini membuat masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dapat dikatakan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan distribusi pendapatan, karena semakin ada jarak antara individu kaya dengan individu miskin dan mereka masyarakat miskin akan semakin kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akan lebih mudah untuk masuk kedalam garis kemiskinan (Dias Widya Ningtyas, 2017). Berikut adalah Data Kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.4**

**Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016-2021**



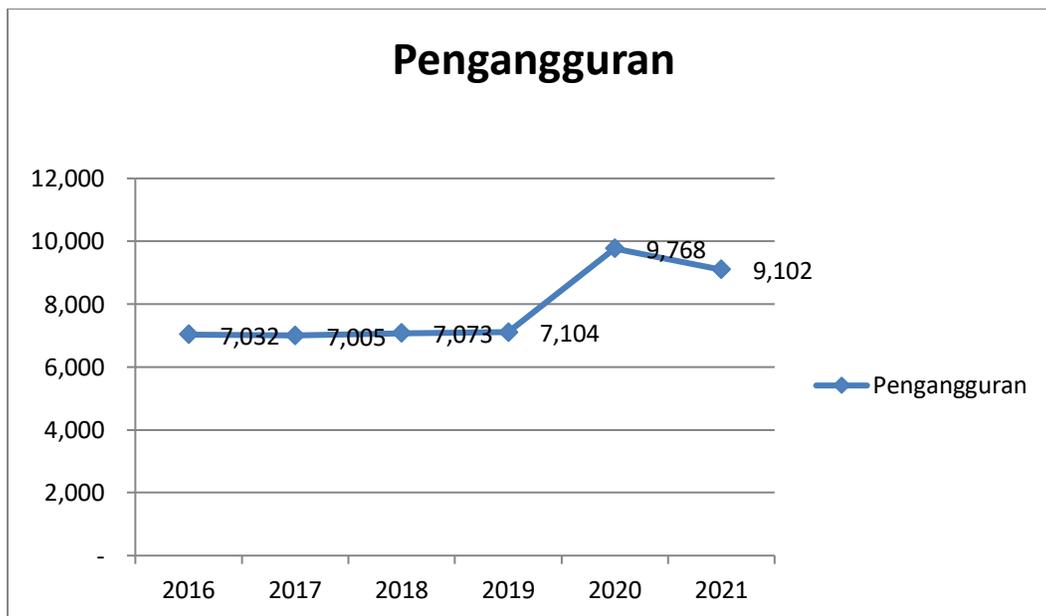
Sumber : Badan Pusat Statistik (Statistik Indonesia 2021)

Dari Tabel 1.4 Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Hand book on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.(BPS,2022)

Pada tabel di atas dapat dilihat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 27.76 jiwa ini merupakan angka tertinggi. Pada saat jumlah penduduk miskin meningkat ini akan menyebabkan jumlah pengangguran akan meningkat, tingkat kematian meningkat, tingkat pendidikan akan rendah serta tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin meningkat jumlah kemiskinan akan semakin rendah pula ketimpangan pendapatan di negara Indonesia.

Selain kemiskinan, tingkat pengangguran juga mempunyai peran penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Peningkatan pengangguran memiliki dampak yang memberatkan pada ketimpangan pendapatan (Cysne & Turchick, 2012). Oleh sebab itu, dengan mengurangi pengangguran, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat dikurangi. Berikut adalah data pengangguran yang ada di Indonesia sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Pengangguran di Indonesia Tahun 2016-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik (Statistik Indonesia 2021)

Pada table 1.5 Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi negara karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu negara yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak merata. Perkembangan pengangguran di Indonesia tahun 2016 - 2021 mengalami naik turun, pada tahun 2016 sebesar 7.032 ribu orang menurun sampai tahun 2019 sebesar 7.104 ribu orang dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9.102 Dengan demikian dapat disimpulkan semakin tinggi angka pengangguran maka akan menyebabkan tinggi nya ketimpangan pendapatan di indonesia, ini menandakan penyerapan tenaga kerja di indonesia tidak maksimal karena jumlah lapangan kerja yang tersedia kalah banyak dari jumlah tenaga kerja.

Berdasarkan uraian ringkas latar belakang serta adanya dukungan hasil sejumlah penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yang berjudul: **Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan di Indonesia.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa Besar Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Seberapa Besar Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia?
3. Seberapa Besar Pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan pendapatan di Indonesia?

4. Seberapa Besar Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan pendapatan di Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat positif:

1. Bagi pemerintah hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi yang berguna dalam pengambilan kebijakan strategis dibidang perekonomian secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia.
2. Bagi akademisi hasil yang diperoleh dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang juga tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan permasalahan di dalam penelitian.